

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGGUNA APBN TAHUN 2021 DI SULAWESI TENGGARA (*Analysis of Affecting Factors on Budget Absorption of The Working Unit Users of APBN 2021 in Southeast Sulawesi*)

Muhammad Teguh Pramesti

muhammad.teguh@kemenkeu.go.id

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Info Jurnal

Sejarah Artikel:

Diterima

16 – 12 – 2021

Disetujui

23 – 12 – 2021

Dipublikasikan

30 – 12 - 2021

Keywords:

*budget absorption,
budget execution,
factor analysis*

Klasifikasi JEL:

H61; H72

Abstract

This research indentify and analyze factors that influence the absorption of rate of goods expenditure budget management working units of APBN users in Sulawesi Tenggara. The population of this research is the working units of APBN users in Sulawesi Tenggara. Working units who participate is 223 users by filling the online questionnaire deployed through the online. Data analyzed by using Exploratory Factor Analysis (EFA) method with SPSS 25 application.

The result of this research are six factors that influence the low absorption of the spending, they are the factor of budget implementation, procurement of goods, the use of fund, ineffective planning, the impact of COVID-19 pandemic, dan geographical. The sum of variance that explained those factors is 62.493%, and the remaining 37.507% explained by other factors.

I. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai berdampak pada semua sendi kehidupan berbangsa dan negara. Sektor perekonomian yang pada tahun pertama pandemi COVID-19 sempat mengalami penurunan, mulai menunjukkan kenaikan. Hingga semester I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tercatat tumbuh sebesar 3,1% dimana pada semester sebelumnya turun sebesar 5,32%.

APBN sebagai tool kebijakan fiscal memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bersama kebijakan fiscal pada tahun 2021 mempunyai tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi” . Tema tersebut merefleksikan upaya pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan perekonomian nasional dari dampak pandemi COVID-19 sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat reformasi kelembagaan pemerintah. Upaya pemerintah untuk merealisasikan tema kebijakan fiscal tersebut antara lain dengan memprioritaskan alokasi APBN tahun 2021 dibidang kesehatan dalam rangka menekan laju penyebaran COVID-19, bidang Pendidikan dan mendukung pemulihan perekonomian diantaranya pembangunan infrastruktur, teknologi dan komunikasi, ketahanan pangan dan perlindungan social.

Kucuran dana APBN yang cukup besar di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp 7,59 Triliun pada tahun 2021 diharapkan menjadi faktor krusial dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana fungsi APBN itu sendiri yaitu sebagai fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dana tersebut dialokasikan kepada 352 satuan kerja kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dari data yang diperoleh dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, hingga akhir semester I tahun 2021, penyerapan belanja negara melalui satuan kerja Kementerian/Lembaga telah melebihi target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 40%. Realisasi anggaran secara akumulasi sebesar Rp 3,43 triliun atau 45,19% dari pagu. Kinerja penyerapan ini jika dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya sudah cukup bagus karena pada tahun sebelumnya pada periode semester I tidak mencapai target 40%. Tahun 2019 penyerapan sebesar 37,87% dari total pagu anggaran Rp 7,29 triliun dan tahun 2020 penyerapan sebesar 38,51% dari pagu Rp 6,04 triliun

Jika di-breakdown per jenis belanja, belanja pegawai memiliki tingkat penyerapan paling tinggi yaitu 50,7% (Rp 1,21 triliun), belanja modal 47,23% (Rp 2,44 triliun) dan belanja bantuan sosial 40,79% Rp (8,18 milyar). Namun masih ada belanja yang dibawah target yang ditetapkan yaitu belanja barang 38,65% (Rp 1,07 triliun). Demikian pula untuk tahun-tahun sebelumnya pada periode yang sama belanja barang juga memiliki penyerapan yang masih dibawah target antara lain sebesar 36,19% (2019) dan 30,25% (2020). Target penyerapan anggaran sampai dengan semester I tahun berkenaan sebesar 40%.

Penyerapan anggaran yang kurang optimal khususnya belanja barang tersebut menjadi konsen penulis untuk mengungkap dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab tersebut yang dapat digunakan sebagai bahan rumusan rekomendasi pada level kebijakan dan strategi implementasi yang tepat yang bersifat teknis aplikatif.

II. TINJAUAN LITERATUR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Menurut Basri (2005), anggaran (budget) ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam waktu tertentu, yang biasanya satu tahun. Suparmoko (2000) berpendapat bahwa anggaran sebagai pernyataan yang dibuat secara rinci mengenai penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu biasanya dalam satu tahun.

Pemerintah setelah menetapkan kebijakan arah kebijakan fiscal selanjutnya pemerintah akan Menyusun dan menetapkan anggaran yang merangkum penerimaan dan pengeluaran dalam periode satu tahun yang disebut APBN. Dasar hukum penyusunan dan penetapan APBN adalah Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pasal 23 ayat 1 yang menyatakan Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian termaktub juga pada paket UU bidang Keuangan Negara yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam pelaksanaan, APBN memiliki beberapa fungsi, yaitu (Wahyuningtyas, 2010) :

- a. Fungsi otoritas yaitu bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan yaitu bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan yaitu bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi yaitu bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
- e. Fungsi stabilitas yaitu bahwa anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Anggaran belanja yang dikelola satuan kerja pada umumnya terbagi menjadi empat yaitu belanja pegawai untuk membiayai pengeluaran berupa gaji pegawai dan tunjangan, belanja barang untuk membiayai belanja pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan,

belanja modal digunakan untuk pembayaran perolehan asset/barang milik negara atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya. Sedangkan belanja bantuan social khusus dikelola oleh satuan kerja yang ditunjuk seperti satuan kerja dari Kementerian Sosial.

Belanja yang sering ada pada satuan kerja adalah belanja barang. Belanja barang dipergunakan untuk beberapa keperluan antara lain:

- 1) Belanja barang operasional pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal
- 2) Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
- 3) Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU
- 4) Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial.

Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kinerja keberhasilan pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengguna APBN disamping indicator yang lain. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 4 tahun 2021 tentang Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2021. Penyerapan anggaran dapat didefinisikan sebagai kemampuan unit pengeluaran (satuan kerja) pemerintah untuk memanfaatkan anggaran yang telah ditentukan untuk mencapai output yang direncanakan secara tepat waktu (Ministry of Finance, Planning, and Economic Development Uganda, dalam Widyaningrum, 2017). Sedangkan Sofyani (2018) menyatakan Penyerapan anggaran selanjutnya dapat dipergunakan sebagai alat pengendali dan strategi penerapan anggaran yang mengarah pada peningkatan kinerja instansi pemerintah. Halim dalam Rahim (2018) menyatakan penyerapan anggaran merupakan realisasi dari pelaksanaan anggaran yang merupakan capaian dari estimasi anggaran selama periode tertentu.

Dalam praktek pengelolaan APBN penyerapan anggaran merupakan angka persentase yang diperoleh dari pembagian belanja yang telah direalisasikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Sebagaimana tertuang dalam Perdirjen perbendaharaan No.4 tahun 2021 indikator penyerapan anggaran menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran satuan kerja. satuan kerja dapat dikatakan melaksanakan anggaran secara efektif apabila pencapaian output terpenuhi dengan target penyerapan yang ditetapkan.

Adapun target penyerapan anggaran satuan kerja terbagi dalam setiap triwulan dengan perincian sebagai berikut:

- Triwulan I sebesar 15%
- Triwulan II sebesar 40%
- Triwulan III sebesar 60%
- Triwulan IV sebesar 90%.

Faktor-faktor penyebab tidak optimalnya belanja barang telah dirumuskan oleh peneliti melalui berbagai proses yang ditentukan sebelumnya yaitu pencarian literatur dengan mempelajari penelitian ilmiah terkait pokok bahasan, melakukan survey ke beberapa satuan kerja, mengikuti FGD (focus group discussion) yang diadakan oleh Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara dan mempelajari laporan reviu pelaksanaan anggaran.

Variable-variabel yang diduga mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja pada semester 1 tahun 2021 antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 : variable yang diduga mempengaruhi penyerapan anggaran

Atribut	Skala	Variabel
Q1	Ordinal	Perencanaan kegiatan/anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
Q2	Ordinal	Anggaran kegiatan Satker masih diblokir
Q3	Ordinal	Salah penentuan mata anggaran (akun) sehingga perlu revisi dokumen anggaran
Q4	Ordinal	Penyusunan rencana penarikan mengikuti trend realisasi tahun sebelumnya
Q5	Ordinal	Koordinasi dengan unit eselon I belum optimal
Q6	Ordinal	Terdapat anggaran kegiatan yang direvisi untuk menyesuaikan dengan SBM

		Tahun 2021
Q7	Ordinal	SDM perencanaan dan penganggaran yang kurang memadai
Q8	Ordinal	Revisi yang diajukan oleh Eselon I membutuhkan waktu yang lama
Q9	Ordinal	Revisi oleh DJA membutuhkan waktu yang lama
Q10	Ordinal	Belum tersedianya barang/jasa yang dibutuhkan pada e-katalog
Q11	Ordinal	Jumlah SDM pengadaan bersertifikat terbatas
Q12	Ordinal	Spesifikasi barang/jasa yang diperlukan tidak tersedia (sulit didapat)
Q13	Ordinal	Terdapat pergantian/mutasi Pejabat Perbendaharaan namun belum ada penggantinya
Q14	Ordinal	SK Pejabat Perbendaharaan yang terlambat terbit
Q15	Ordinal	Aplikasi dari internal K/L belum/terlambat menyesuaikan dengan Juknis yang baru
Q16	Ordinal	Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada akhir tahun (waktunya sudah ditentukan)
Q17	Ordinal	Satker terkendala dalam pelaksanaan anggaran karena Juknis/Aturan Kegiatan yang terlambat terbit
Q18	Ordinal	Ketentuan mengenai maksimum pencairan (MP) dana PNBPN belum ditetapkan
Q19	Ordinal	Kegiatan yang dibiayai oleh PNBPN terhambat karena penerimaan PNBPN rendah
Q20	Ordinal	Pemotongan anggaran menghambat jalannya kegiatan Satker
Q21	Ordinal	Satker terkendala dalam melakukan koordinasi dengan pihak ketiga karena faktor jarak dan geografis
Q22	Ordinal	Kegiatan tatap muka/ yang mengumpulkan orang banyak harus ditunda karena pandemi covid-19
Q23	Ordinal	Koordinasi antar unit perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan kurang baik
Q24	Ordinal	Penambahan anggaran belanja mengurangi kinerja penyerapan anggaran Satker
Q25	Ordinal	Migrasi rekening virtual account menghambat penyerapan
Q26	Ordinal	Realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan karena adanya fluktuasi harga barang
Q27	Ordinal	Terdapat permasalahan terkait pendaftaran/pergantian supplier pada KPPN
Q28	Ordinal	Perubahan pola kerja akibat Pandemi Covid-19 berdampak pada kebutuhan belanja Satker
Q29	Ordinal	Jaringan internet kurang baik
Q30	Ordinal	Pekerjaan terhambat akibat cuaca

Sumber: diolah (2021)

III. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana penulis memperoleh data tersebut dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang berasal dari satuan kerja. Responden tersebut merupakan pejabat/pegawai yang menangani anggaran dan keuangan satker. Dari target responden sebanyak 352 satker di wilayah Sulawesi Tenggara terdapat 223 satker yang berpartisipasi dengan mengisi kuesioner secara daring melalui tautan googleform yang disebar ke satker melalui media daring. Kuesioner terdiri dari pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan tertutup diukur menggunakan skala linkert dengan skala 1 - 5. Sedangkan pertanyaan terbuka diberikan untuk mengakomodasi permasalahan lainnya yang tidak terangkum dalam pertanyaan.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis faktor *Exploratory Factor Analysis* (EFA). Sedangkan aplikasi yang digunakan adalah SPSS 25. *Exploratory Factor Analysis* merupakan Teknik yang digunakan dalam kondisi dimana peneliti tidak memiliki informasi awal terhadap instrument/variabel yang akan ditanyakan kepada responden. Sehingga peneliti menggunakan beberapa proses sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.

Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh adalah:

- 1) Uji validitas dan reliabilitas.

Pengujian validitas dan reabilitas merupakan langkah awal dalam analisis factor dengan metode EFA. Pengujian ini digunakan untuk mengukur kualitas instrument penelitian sebelum dilanjutkan analisis faktor. Pengujian validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila memiliki pertanyaan yang mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. (Ghozali, 2013). Pengujian ini akan membandingkan r hitung dan r table. Nilai r hitung diperoleh dari olah data menggunakan aplikasi SPSS yang menghasilkan nilai *correlated item*. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai r table dengan $Df = n - 2$ dan signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$). Sebuah instrument dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r table.

Pengujian reabilitas dilakukan setelah memperoleh hasil semua kuesioner dinyatakan valid. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah jawaban responden terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Singarimbun dan effendi menyatakan bahwa uji reabilitas ini menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat diandalkan ayau dapat dipercaya. (Rahim, 2017).

Penulis menggunakan nilai *Cronbach Alpha* hasil dari olah data SPSS 25 untuk mengetahui reabilitas sebuah instrument. Instrument dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6.

2) Pengujian Korelasi antar variabel

Pengujian ini dapat dilakukan setelah memperoleh hasil semua instrument dinyatakan valid dan reliabel. Uji matriks korelasi menggunakan beberapa metode yaitu pengujian *Kaiser Mayer Olkin* (KMO) *Measure of Sampling Adequacy* untuk mengukur kecukupan sampling dengan membandingkan besarnya koefisien korelasi terhadap koefisien parsial. Nilai KMO yang kecil atau $< 0,5$ menunjukkan bahwa korelasi antar pasangan variabel tidak bisa diterangkan oleh variabel lainnya dan analisis factor tidak dilanjutkan. Sedangkan Bartlett test of Sphericity dilakukan untuk menguji apakah matriks korelasi adalah matriks identitas atau bukan. Menurut Yamin dan Kurniawan (2009) layak tidaknya factor yaitu apabila nilai KMO $> 0,5$ dan *Barlett Test of Sphericity* $< 0,05$. Pengujian lain menggunakan *anti images matrices correlation* dengan melihat nilai MSA (*Measure Sampling Adequacy*) untuk menilai kelayakan setiap variabel yang digunakan dalam analisis factor. Instrumen dinyatakan lolos pengujian ini apabila diperoleh nilai MSA $> 0,5$.

3) Ekstraksi Factor

Tahapan selanjutnya adalah menentukan banyaknya jumlah factor yang terbentuk metode yang digunakan dalam tahap ini adalah dengan mereduksi data dari beberapa indikator untuk memperoleh faktor yang lebih sedikit. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mrngekstraksi faktor antara lain: akar ciri, persentase keberagaman (*eigenvalue*) dan *scree test*. Penelitian ini menggunakan persentase keberagaman (*eigenvalue*) dan *scree test*.

4) Distribusi variabel dan Rotasi faktor

Setelah terbentuk beberapa factor, Langkah selanjutnya adalah mendistribusikan item pertanyaan ke dalam factor-factor baru berdasarkan loading faktornya menggunakan *component matrix*. Loading factor menunjukkan tingkat keeratan variabel-variabel yang digunakan dengan factor-factor yang baru terbentuk. Semakin besar nilai loading factor suatu variabel mengindikasikan bahwa variabel tersebut dapat dimasukkan ke dalam factor terbentuk. Sedangkan rotasi faktor dilaksanakan dengan tujuan agar semua variabel dapat dimasukkan ke dalam faktor baru yang terbentuk. Terdapat dua metode rotasi faktor menurut Rummel (1988) yaitu *orthogonal* dan *oblique*. Metode yang digunakan pada analisis ini adalah metode *orthogonal* yang menganggap bahwa faktor-faktor yang terbentuk merupakan factor independent.

5) Penamaan dan Pembahasan factor

Setelah memperoleh faktor-faktor hasil olah data, tahap selanjutnya adalah melakukan penamaan factor terbentuk berdasarkan karakteristik masing-masing variabel yang terkelompok. Tidak ada pedoman secara pasti dalam hal penamaan faktor namun peneliti akan menggunakan pengetahuan dan pengalaman dibidang pelaksanaan anggaran untuk menentukan penamaan faktor. Setelah faktor yang terbentuk diberikan nama sesuai dengan karakteristik masing-masing, Langkah terakhir adalah melakukan pembahasan faktor terkait pengaruh dan penjelasan yang permasalahan yang relevan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan olah data menggunakan aplikasi SPSS.25 diperoleh beberapa hasil pengujian yang dipersyaratkan dalam analisis EFA, antara lain.

Uji validitas dan reabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur kevalidan butir-butir kuesioner, dimana sebuah kuesioner yang valid akan mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai r hitung dan r table. Proses uji validitas kali ini menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 25 dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Adapun item pertanyaan yang diuji validitasnya sebanyak 30 item pertanyaan. Berdasarkan pengujian 2 arah diperoleh r table sebesar 0,1314 sehingga semua item pertanyaan yg dinyatakan valid karena nilai r hitung > 0,1314 dan semua pertanyaan dapat diikutkan pada pengujian reliabilitas. Perbandingan nilai r hitung dengan r table dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 : Hasil Uji Validitas

	Item Pertanyaan	Corrected Item-Total Correlation	Nilai r tabel	ket
1	Perencanaan kegiatan/anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	0,501	0,1314	valid
2	Anggaran kegiatan Satker masih diblokir	0,498	0,1314	valid
3	Salah penentuan mata anggaran (akun) sehingga perlu revisi dokumen anggaran	0,493	0,1314	valid
4	Penyusunan rencana penarikan mengikuti trend realisasi tahun sebelumnya	0,442	0,1314	valid
5	Koordinasi dengan unit eselon I belum optimal	0,610	0,1314	valid
6	Terdapat anggaran kegiatan yang direvisi untuk menyesuaikan dengan SBM Tahun 2021	0,544	0,1314	valid
7	SDM perencanaan dan penganggaran yang kurang memadai	0,606	0,1314	valid
8	Revisi yang diajukan oleh Eselon I membutuhkan waktu yang lama	0,569	0,1314	valid
9	Revisi oleh DJA membutuhkan waktu yang lama	0,590	0,1314	valid
10	Belum tersedianya barang/jasa yang dibutuhkan pada e-katalog	0,619	0,1314	valid
11	Jumlah SDM pengadaan bersertifikat terbatas	0,408	0,1314	valid
12	Spesifikasi barang/jasa yang diperlukan tidak tersedia (sulit didapat)	0,590	0,1314	valid
13	Terdapat pergantian/mutasi Pejabat Perbendaharaan namun belum ada penggantinya	0,661	0,1314	valid
14	SK Pejabat Perbendaharaan yang terlambat terbit	0,648	0,1314	valid
15	Aplikasi dari internal K/L belum/terlambat menyesuaikan dengan Juknis yang baru	0,637	0,1314	valid
16	Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada akhir tahun (waktunya sudah ditentukan)	0,549	0,1314	valid
17	Satker terkendala dalam pelaksanaan anggaran karena Juknis/Aturan Kegiatan yang terlambat terbit	0,690	0,1314	valid
18	Ketentuan mengenai maksimum pencairan (MP) dana PNBPN belum ditetapkan	0,649	0,1314	valid
19	Kegiatan yang dibiayai oleh PNBPN terhambat karena penerimaan PNBPN rendah	0,554	0,1314	valid
20	Pemotongan anggaran menghambat jalannya kegiatan Satker	0,433	0,1314	valid
21	Satker terkendala dalam melakukan koordinasi dengan pihak ketiga karena faktor jarak dan geografis	0,635	0,1314	valid
22	Kegiatan tatap muka/ yang mengumpulkan orang banyak harus ditunda karena pandemi covid-19	0,274	0,1314	valid

23	Koordinasi antar unit perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan kurang baik	0,717	0,1314	valid
24	Penambahan anggaran belanja mengurangi kinerja penyerapan anggaran Satker	0,612	0,1314	valid
25	Migrasi rekening virtual account menghambat penyerapan	0,500	0,1314	valid
26	Realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan karena adanya fluktuasi harga barang	0,632	0,1314	valid
27	Terdapat permasalahan terkait pendaftaran/pergantian supplier pada KPPN	0,641	0,1314	valid
28	Perubahan pola kerja akibat Pandemi Covid-19 berdampak pada kebutuhan belanja Satker	0,518	0,1314	valid
29	Jaringan internet kurang baik	0,493	0,1314	valid
30	Pekerjaan terhambat akibat cuaca	0,425	0,1314	valid

Sumber: output SPSS 25 (diolah)

Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas dimana pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi jawaban dari responden dari waktu ke waktu. Manfaat pengujian ini adalah untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan dipercaya (Singarimbun dan Efendi, 1989).

Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,600, dengan kriteria menurut Guilford (1965) apabila didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* 0,20 - 0,40 dengan kategori rendah, 0,40 - 0,60 kategori sedang, 0,60 - 0,80 kategori tinggi dan 0,8 - 1,00 kategori sangat tinggi. kurang dari 0,600 berarti buruk; sekitar 0,700 diterima; dan lebih dari atau sama dengan 0,800 adalah baik.

Terhadap 30 item pertanyaan yang telah lolos uji validitas (dinyatakan valid) selanjutnya dilakukan uji reliabilitas, yang menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,936. Menurut Guilford nilai Cronbach alpha tersebut tergolong sangat tinggi karena berada di rentang antara 0,8 dan 1,0, sehingga disimpulkan hasil kuesioner sudah andal (reliabel) dengan kategori reliabilitas sangat tinggi dan layak dilakukan pengujian selanjutnya.

Uji Matriks korelasi dan ekstraksi factor

Dari hasil pengujian korelasi antar variabel terhadap ke-30 item pertanyaan dihasilkan nilai KMO Measure of Sampling Adequacy sebesar 0,906 (>0,5), Bartlett Test of Sphericity sebesar 0,000 (<0,05) dan uji Anti Image Matrices Correlation dengan nilai Measures of Sampling Adequacy (MSA) lebih dari 0,5. Namun dikarenakan ada tiga item pernyataan yang tidak memenuhi persyaratan komunalitas yaitu lebih besar dari 0,5 (komunalitas > 0,5) yaitu

Q4 - Penyusunan rencana penarikan mengikuti trend realisasi tahun sebelumnya)

Q16 - Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada akhir tahun (waktunya sudah ditentukan)

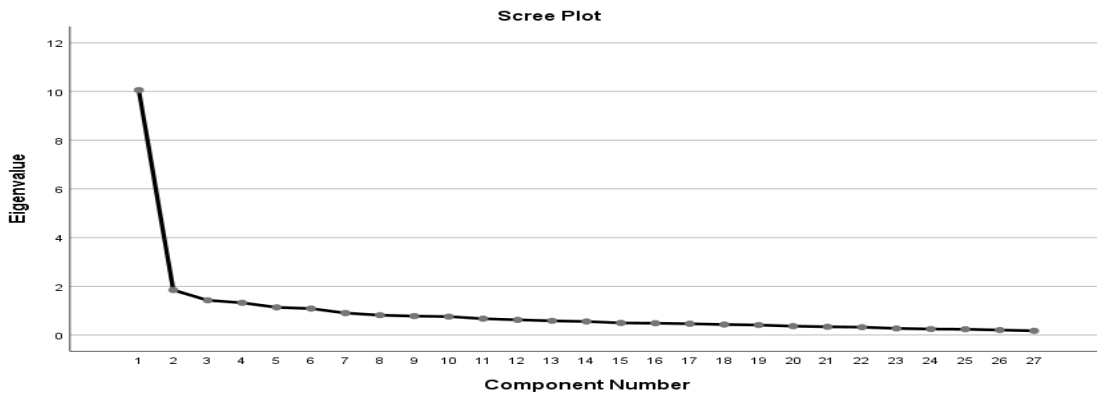
Q24 - Kegiatan yang dibiayai oleh PNBPN terhambat karena penerimaan PNBPN rendah (Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada akhir tahun/waktunya sudah ditentukan)

maka item tersebut dikeluarkan dari pengujian dan dilakukan pengujian ulang.

Hasil pengujian ulang terhadap korelasi antar variabel terhadap 27 item pertanyaan dihasilkan nilai KMO Measure of Sampling Adequacy sebesar 0,906 (>0,5) dan Bartlett Test of Sphericity sebesar 0,000 (lebih dari 0,05) dan nilai komunalitas berada di atas 0,05 sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

Ekstraksi factor dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menginterpretasikan grafik Scree Plot yang dihasilkan aplikasi SPSS dan menggunakan pendekatan persentase keragaman (eigenvalue). Adapun gambar Scree Plot yang dihasilkan oleh data menggunakan SPSS 25 adalah sebagai berikut:

Gambar 1: Scree Plot



Sumber: output SPSS 25 (diolah)

Gambar *Scree Plot* menunjukkan kaitan antara variabel dengan nilai eigennya. Proses ekstraksi factor terhenti ketika kurva atau garis menjadi lebih landai. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa kurva mulai melandai pada saat 6 komponen telah terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 6 factor yang ideal menjadi penyebab permasalahan yang dianalisis.

Cara kedua menggunakan pendekatan persentase keragaman atau *eigenvalue*. Jumlah factor ditentukan dari jumlah variable yang mendapatkan nilai *eigenvalue* > 1 setelah dilakukan ekstraksi factor. Dari hasil olah data menggunakan SPSS 25 diperoleh 6 faktor dengan nilai *eigenvalue* lebih dari 1 dengan persentase varian kumulatif sebesar 63,559%.

Distribusi variable dan rotasi factor

Hasil yang diperoleh dari uji matriks korelasi dan ekstraksi factor diperoleh komponen/factor sebanyak 6 dimana 27 item pertanyaan akan didistribusikan ke dalam 6 faktor tersebut berdasarkan loading factornya dengan menggunakan component matriks sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3 : Hasil Rotasi Faktor

	Component					
	1	2	3	4	5	6
Q1	0,268	0,156	0,712	-0,082	0,116	0,224
Q2	0,276	0,066	0,714	0,210	0,008	0,000
Q3	0,223	0,122	0,030	0,723	0,103	0,172
Q5	0,346	0,396	0,355	0,273	0,126	-0,087
Q6	0,203	0,186	0,114	0,776	0,146	0,040
Q7	0,220	0,551	0,276	0,377	0,014	0,053
Q8	0,258	0,666	0,219	0,085	0,275	-0,303
Q9	0,351	0,456	0,275	0,129	0,401	-0,363
Q10	0,346	0,678	0,161	-0,019	0,097	0,186
Q11	0,006	0,667	-0,055	0,185	0,135	0,245
Q12	0,201	0,750	0,043	0,147	0,108	0,253
Q13	0,466	0,334	0,274	0,416	-0,004	0,054
Q14	0,476	0,270	0,394	0,343	-0,066	0,101
Q15	0,592	0,111	0,289	0,287	0,146	0,006
Q17	0,542	0,309	0,290	0,160	0,187	0,100
Q18	0,617	0,160	0,266	0,208	0,068	0,161
Q20	0,289	0,152	-0,123	0,071	0,702	0,121
Q21	0,453	0,204	0,090	0,300	0,312	0,313

Q22	-0,269	0,085	0,338	0,226	0,650	0,147
Q23	0,686	0,246	0,370	0,188	-0,012	0,099
Q24	0,632	0,117	0,223	0,131	0,275	-0,023
Q25	0,756	0,168	-0,026	-0,065	0,021	0,101
Q26	0,620	0,196	-0,056	0,257	0,339	0,034
Q27	0,724	0,097	0,197	0,189	0,119	0,078
Q28	0,302	0,166	0,061	0,016	0,728	0,179
Q29	0,136	0,340	0,253	0,105	0,128	0,633
Q30	0,184	0,109	0,049	0,155	0,257	0,738

Sumber: output SPSS 25 (diolah)

Penamaan faktor

Pemberian nama faktor yang terbentuk dari hasil rotasi matriks tidak terdapat standar baku atau acuan baku penamaan faktor. Namun ke delapan faktor yang terbentuk diberikan nama yang sesuai dengan karakteristik item-item pertanyaan. Oleh karena itu diperlukan justifikasi yang tepat berdasarkan karakteristik yang ada. Adapun setelah melihat karakteristik variabel yang membentuk diberikan nama keenam faktor tersebut dengan nama dibawah ini:

Tabel 4: Penamaan Faktor yang Terbentuk

Nama Faktor	Eigen Value/Total variance		Item Pertanyaan	Loading faktor
Kendala Pelaksanaan Anggaran	37,243%	Q13	Terdapat pergantian/mutasi Pejabat Perbendaharaan namun belum ada penggantinya	0,466
		Q14	SK Pejabat Perbendaharaan yang terlambat terbit	0,476
		Q15	Aplikasi dari internal K/L belum/terlambat menyesuaikan dengan Juknis yang baru	0,592
		Q17	Satker terkendala dalam pelaksanaan anggaran karena Juknis/Aturan Kegiatan yang terlambat terbit	0,542
		Q18	Ketentuan mengenai maksimum pencairan (MP) dana PNBPN belum ditetapkan	0,617
		Q21	Pemotongan anggaran menghambat jalannya kegiatan Satker	0,453
		Q23	Koordinasi antar unit perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan kurang baik	0,686
		Q24	Penambahan anggaran belanja mengurangi kinerja penyerapan anggaran Satker	0,632
		Q25	Migrasi rekening virtual account menghambat penyerapan	0,756
		Q26	Realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan karena adanya fluktuasi harga barang	0,620
		Q27	Terdapat permasalahan terkait pendaftaran/pergantian supplier pada KPPN	0,724
Kendala Pengadaan Barang	6,839%	Q5	Koordinasi dengan unit eselon I belum optimal	0,396
		Q7	SDM perencanaan dan penganggaran yang kurang memadai	0,551
		Q8	Revisi yang diajukan oleh Eselon I membutuhkan waktu yang lama	0,666
		Q9	Revisi oleh DJA membutuhkan waktu yang lama	0,456
		Q10	Belum tersedianya barang/jasa yang dibutuhkan pada e-katalog	0,678
		Q11	Jumlah SDM pengadaan bersertifikat terbatas	0,667

		Q12	Spesifikasi barang/jasa yang diperlukan tidak tersedia (sulit didapat)	0,750
Kendala Penggunaan dana		Q1	Perencanaan kegiatan/anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	0,712
	5,279%	Q2	Anggaran kegiatan Satker masih diblokir	0,714
Perencanaan Anggaran Kurang efektif	4,9%	Q3	Salah penentuan mata anggaran (akun) sehingga perlu revisi dokumen anggaran	0,723
		Q6	Terdapat anggaran kegiatan yang direvisi untuk menyesuaikan dengan SBM Tahun 2021	0,776
Pandemi COVID-19	4,206	Q20	Pemotongan anggaran menghambat jalannya kegiatan Satker	0,702
		Q22	Kegiatan tatap muka/ yang mengumpulkan orang banyak harus ditunda karena pandemi covid-19	0,650
			Perubahan pola kerja akibat Pandemi Covid-19 berdampak pada kebutuhan belanja Satker	
Iklim dan Geografis	4,025%	Q29	Jaringan internet kurang baik	0,633
		Q30	Pekerjaan terhambat akibat cuaca	0,738

Sumber: data diolah

Pembahasan faktor

Berdasarkan analisis *Exploratory Factor Analysis* (EFA) permasalahan kurang optimalnya penyerapan anggaran pada semester I Tahun 2021 pada satuan kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diterangkan dengan 6 faktor dengan variansi sebesar 62,49%. Sedangkan sisanya sebesar 37,51% disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam analisis ini. Adapun pembahasan keenam faktor tersebut antara lain:

a. Kendala Pelaksanaan Anggaran

Pemahaman terhadap Kebijakan DJPb menjelaskan seluruh item sebesar 37,243% merupakan faktor yang paling dominan dalam kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja barang satuan kerja pada semester I tahun 2021. Variabel yang dikelompokkan ke dalam faktor ini sebanyak 11 variabel, dimana 3 variabel yang memiliki *loading factor* terbesar adalah adanya migrasi ke rekening *virtual account* (0,756) dan pendaftaran/pergantian supplier pada KPPN (0,724) dan Koordinasi antar unit perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan kurang baik (0,686).

Migrasi rekening dari rekening konvensional ke rekening virtual account pada bendahara satuan kerja menjadi salah satu permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran. Kebijakan tersebut diadakan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka mempermudah pengawasan dan penatausahaan rekening pemerintah dan diuji cobakan pada akhir tahun 2020 untuk beberapa satker tertentu dan diterapkan secara penuh mulai awal tahun 2021. Oleh karena itu satker diharapkan dapat beradaptasi dan mempersiapkan untuk pelaksanaan kebijakan ini.

Sedangkan variabel kedua yang dikelompokkan ke dalam faktor ini yang memiliki *loading factor* terbesar adalah pendaftaran/pergantian supplier pada KPPN (0,724). Satuan kerja perlu memahami bisnis proses pendaftaran/pergantian supplier dikarenakan proses tersebut memerlukan beberapa langkah untuk memastikan data yang disampaikan ke KPPN adalah sebagaimana mestinya. Variabel yang ketiga yang memiliki *loading factor* terbesar adalah Koordinasi antar unit perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan kurang baik (0,686). Permasalahan ini merupakan kondisi internal satuan kerja yang memerlukan penyelesaian oleh kepala satuan kerja bersangkutan. Apabila unsur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kurang memiliki sinergi maka akan mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran bersangkutan karena ketiga unsur tersebut saling berkaitan erat satu sama lain.

b. Pengadaan Barang

Faktor administrasi pengadaan barang menjelaskan seluruh item sebesar 6,839% merupakan faktor kedua yang mempengaruhi kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja barang satker semester I tahun 2021. Terdapat 7 permasalahan yang dikelompokkan dalam faktor ini. Permasalahan yang memiliki *loading factor* tertinggi adalah Spesifikasi barang/jasa yang diperlukan tidak tersedia/sulit

didapat (0,750). Selanjutnya adalah permasalahan Belum tersedianya barang/jasa yang dibutuhkan pada e-katalog dengan loading factor sebesar (0,678). Kedua permasalahan tersebut saling terkait dimana adanya kesulitan dari satker beberapa untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Beberapa barang yang sulit diperoleh satker, dari hasil wawancara penulis dengan satker terkait antara lain; bibit tanaman tertentu yang tidak tersedia di Sulawesi Tenggara, peralatan/obat-obatan di bidang kesehatan yang harus mendatangkan dari luar provinsi serta peralatan. Permasalahan ketiga dengan *loading factor* terbesar yang dikelompokkan pada factor ini adalah Jumlah SDM pengadaan bersertifikat terbatas.

c. Penggunaan Sumber Dana

Faktor Blokir Anggaran menjelaskan seluruh item sebesar 5,279%, dimana pada factor ini terdapat dua permasalahan yaitu Blokir Anggaran (*loading factor* 0,714) dan Perencanaan kegiatan/anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan (*loading factor* 0,712). Blokir anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan satker tidak dapat melaksanakan kegiatan dikarenakan sumber dana belum tersedia dikarenakan masih ada anggaran yang diblokir oleh DJA. Demikian pula dengan permasalahan selanjutnya dimana satker akan kesulitan apabila kebutuhan dana tidak sesuai dengan dengan perencanaan. Satker akan memerlukan penyesuaian/revisi yang akan mengganggu kinerja penyerapan anggaran satker.

d. Perencanaan Anggaran yang Kurang Efektif

Faktor ini menjelaskan seluruh item sebesar 4,9%. Permasalahan yang dikelompokkan pada faktor ini adalah Salah penentuan mata anggaran (akun) sehingga perlu revisi dokumen anggaran (0,723) dan Terdapat anggaran kegiatan yang direvisi untuk menyesuaikan dengan SBM Tahun 2021 (0,776). Perencanaan memegang peranan penting dalam kinerja penyerapan anggaran dimana penyerapan anggaran akan efektif apabila perencanaan sesuai dengan kebutuhan satker.

e. Dampak Pandemi COVID-19

Panamaan factor selanjutnya adalah faktor Dampak Pandemi COVID-19. Faktor ini menjelaskan seluruh item sebesar 4,206%. Permasalahan yang dikelompokkan dalam faktor ini terdiri dari adanya pemotongan anggaran (*loading factor* 0,702), kebijakan penundaan kegiatan tatap muka (*loading factor* 0,650) dan perubahan pola kerja akibat pandemi (*loading factor* 0,728). Pemotongan anggaran mulai dilakukan dalam rangka penghematan yang dilakkan sejak awal pandemi. Demikian pula dengan kebijakan peniadaan/penundaan kegiatan tatap muka dalam rangka menahan laju penyebaran COVID-19. Permasalahan yang dirasakan sebagai akibat pandemi COVID-19 adalah perubahan pola kerja. Perubahan ini berupa kebijakan WFH, pembatasan perjalanan dinas, pembatasan rapat tatap muka dan sebagainya.

f. Faktor Geografis

Factor terakhir yang terbentuk dari hasil olah data menggunakan SPSS 25 menunjukkan permasalahan yang disebabkan oleh jaringan internet yang kurang baik dan terhambatnya pekerjaan dikarenakan iklim/cuaca. Faktor ini penulis namakan dengan factor Iklim dan Cuaca dengan dimana menjelaskan seluruh item sebesar 4,025%. Kondisi utama penyebab jaringan internet yang kurang baik adalah keberadaan satker yang tersebut di seluruh Sulawesi Tenggara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau. Sedangkan iklim/cuaca Sulawesi Tenggara pada awal tahun sampai dengan medio tahun 2021 ini merupakan kendala yang dihadapi satker dimana iklim/cuaca kurang menentu dan sering terjadi hujan sehingga sangat mengganggu kegiatan satker terutama satker yang aktivitasnya banyak di lapangan.

V. KETERBATASAN DAN PENELITIAN MASA DEPAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain

a. Jumlah data responden

Data responden berupa data primer yang diolah sebanyak 223 data responden dari total responden satker lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 253 satker. Namun jumlah responden tersebut telah cukup memenuhi batas minimal untuk dilakukan analisis faktor yaitu 175 responden.

b. Wilayah penelitian

Selanjutnya wilayah penelitian yang terbatas pada Sulawesi Tenggara sehingga kesimpulan yang diperoleh pun terbatas pada lingkup Sulawesi Tenggara sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk men-generalisir di wilayah yang lebih luas.

c. Teknis analisis

Hasil penelitian ini merupakan hasil kesimpulan dari penggunaan teknik exploratory factor analysis sehingga diperlukan penelitian menggunakan teknis analisis lain yang relevan seperti confirmatory factor analysis dll.

VI. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data hasil penelitian terhadap 223 satker pengelola APBN lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara diperoleh beberapa factor-faktor penyebab permasalahan penyerapan anggaran belanja barang kurang optimal pada semester I tahun 2021, antara lain: (1) Pelaksanaan Anggaran, dengan total variance 37,243%, (2) Pengadaan Barang, dengan total variance 6,839%, (3) Penggunaan Sumber Dana, dengan total variance 5,279%, (4) Perencanaan Anggaran yang Kurang Efektif, dengan total variance 4,9%, (5) Dampak Pandemi COVID-19, dengan total variance 4,206%, (6) Geografis, dengan total variance 4,025%. Keenam faktor tersebut secara total menjelaskan permasalahan kurang optimalnya penyerapan anggaran sebesar 62,493% sedang sisanya 37,507% dijelaskan oleh factor lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 4/PB/2021 Tahun 2021 tentang Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Agustina E. Wahyuningtyas. (2010). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Defisit Anggaran terhadap Investasi di Indonesia tahun 1986-2008. Skripsi.Fakultas Ekonomi. UNDIP.
- Basri, Zainul Yuswar dan Mulyadi Subri. (2005). Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta : Rajawali Press.
- Herryanto, Hendris. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta.Tesis. Jakarta fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Karmilati.(2020).Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Makassar I Tahun Anggaran 2018. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kuswoyo, Iwan Dwi. (2012). Analisis factor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri). Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada
- Rahim, Aulia, Harsya Saputra. (2018). Exploratory Factor Analysis (EFA) pada Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat. Indonesian treasury Review, 3, 3, 236-254.
- Sofyani, Hafiez, Made Aristia Prayudi. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja "A". Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 13, 1, 54-64.
- Suparmoko, (2000). Keuangan Negara:dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta
- Widianingrum, Desika, Alwan Sri Kustono, Ika Barokah Suryaningsih. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen, 11,2,194-208.
- Zaenudinsyah, Fandi. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukkan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. Indonesian treasury Review, 1, 1, 67-83.